

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Siap Bahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 Secara Menyeluruh



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/386451/dprd-banjarbaru-siap-bahas-rapbd-2024-secara-menyeluruh>

Ketua DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan Fadliansyah mengatakan pembahasan rancangan APBD tahun 2024 akan dibahas menyeluruh oleh seluruh anggota dewan bersama tim pemerintah kota setempat. Pembahasan rancangan APBD akan dilakukan menyeluruh dan kami siap fokus membahas berbagai program yang direncanakan pemkot selama satu tahun ke depan.

Pembahasan menyeluruh dan mendalam akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat program terhadap kepentingan masyarakat yang tentu harus lebih diprioritaskan. Ditekankan, pihaknya sudah sepakat bersama seluruh anggota DPRD siap mendukung program yang sudah direncanakan pemkot sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan agar hasilnya dirasakan masyarakat.

Program yang kami dukung selain sesuai skala prioritas juga sejalan dengan kebutuhan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bukan hanya program yang disusun sesuai keinginan. Program yang didukung seperti pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan, fasilitas air bersih termasuk program pendidikan dan kesehatan yang harus dipenuhi pemerintah demi masyarakat.

Program yang berpihak terhadap masyarakat tentu kami dukung dan diharapkan terealisasi sesuai apa yang direncanakan sehingga seluruh hasil dirasakan masyarakat. Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin menyampaikan rancangan APBD tahun 2024 pada rapat paripurna yang terdiri dari pendapatan dan belanja selama

satu tahun ke depan. Belanja daerah tahun 2024 dalam rancangan APBD diproyeksi sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Sementara, dari sisi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp329,3 miliar dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah itu terjadi selisih sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp90,7 miliar yang ditutupi dengan Silpa, dana cadangan daerah dan pembiayaan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386451/dprd-banjarbaru-siap-bahas-rapbd-2024-secara-menyeluruh>, 11 Oktober 2023.
2. <https://retorikabanua.id/bahas-rapbd-2024-secara-menyeluruh-ketua-dprd-banjarbaru-kami-siap/>, 11 Oktober 2023.

#### **Catatan Berita:**

#### **Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003**

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.  
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.